

BAB III

PROFIL KOTA PAYAKUMBUH

3.1 Profil Kota Payakumbuh

Payakumbuh adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Sumatera barat, Indonesia. Kota ini terkenal akan kekayaan budayanya dan sejarahnya yang unik. Makna kata “Payakumbuh” memiliki makna yang spesifik dan berkaitan erat dengan kondisi alam serta lingkungan disekitaran kota tersebut. Asal-usul kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Minangkabau, yaitu “Payo” yang berarti rawa dan “Kumbuh” yang merujuk pada tumbuhan tertentu yang sering tumbuh disekitar wilayah rawa tersebut.

Kata pertama dalam nama Payakumbuh adalah “Payo” yang berarti rawa. Rawa adalah tempat yang selalu basah dan tergenang air, dengan tanah yang lembek dan sering ditanami berbagai tumbuhan air. Dulu, wilayah sekitar Payakumbuh memang terkenal memiliki rawa ang luas, terutama di daerah kenagarian Koto Nan Gadang. Keberadaan rawa ini memberikan ciri khas tertentu pada lingkungan sekitar dan menjadi bagian penting dari wilayah alam tersebut. Rawa di Kota Payakumbuh dahulu mmiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan penggunaan sumber daya alam. Banyak tanaman bisa tumbuh subur di rawa., dan tanah yang lembab dan kaya akan nutrisi membuatnya cocok untuk berbagai jenis tanaman, seperti padi dan kelapa.

Kata kedua dalam nama Payakumbuh adalah “Kumbuh” yang merujuk pada banyak jenis tanaman yang tumbuh di rawa, terutama di wilayah kenagarian Koto Nan Gadang. Tanaman kumbuh tumbuh dengan baik di daerah yang tergenang air, dan keberadaannya sangat berkaitan erat dengan keberadaan ekosistem di Payakumbuh. Selain itu, tanaman kumbuh pada masa lalu juga digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh masyarakat sekitar.

Nama Payakumbuh menggambarkan identitas daerah yang kuat, yang menunjukkan hubungan erat antara alam dan sumber daya alam yang

melimpah. Karena sejarah tersebut, tidak mengherankan jika masyarakat Payakumbuh merasa bangga atas asal-usul daerah mereka. Nama Payakumbuh bukan hanya sekedar gelar, tetapi juga melambangkan hubungan seimbang antara manusia dan alam yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

Kota Payakumbuh, terutama pusat kota, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak Belanda terlibat dalam Perang Padri, daerah ini berkembang menjadi tempat penyimpanan hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu wilayah administrasi yang dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda waktu itu. Menurut cerita dari warga setempat, di salah satu bagian kota ini terdapat nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik.

Pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan nagari tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu kini dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu. Sejak sebelum kemerdekaan, Payakumbuh sudah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan khususnya bagi wilayah Luhak Limo Puluah. Ketika pemerintahan Belanda berkuasa, Payakumbuh adalah tempat tugas asisten residen yang mengurus wilayah Luhak Limo Puluah. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat pemerintahan wilayah Luhak Limo Puluah (Aboe, 2008).

3.1.1 Kondisi Geografis Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terletak di dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Kota ini berada di kaki Gunung Sago dan memiliki bentang alam dengan ketinggian yang beragam. Topografinya berupa perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Wilayah kota ini dilalui oleh tiga sungai yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26°C, sedangkan kelembapan udaranya sekitar 45–50%.

Gambar 3.1
Peta Kota Payakumbuh



Sumber: Website Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh merupakan salah satu dari tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di antara 00°10' hingga 00°17' LS dan 100°35' hingga 100°45' BT. Secara geografis, kota ini berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadikannya dikelilingi oleh beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Di sebelah utara, Kota Payakumbuh berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh; di sebelah selatan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari; di sebelah barat dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, serta di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau.

Jarak Kota Payakumbuh ke Kota Bukittinggi adalah sekitar 30 km, ke Kota Padang sejauh 120 km, dan ke Kota Pekanbaru sejauh 188 km. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas wilayah kota ini adalah 80,43 km² atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat. Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat. Pada tahun 1970, kota ini pernah menjadi kota terluas, sebelum diperluas wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto yang pada tahun 1970 adalah kota terkecil dengan luas 6,3 km², kini diperluas menjadi 273,45 km², meningkat 43,4 kali

lipat. Sementara itu, Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km² dan menjadi kota terluas di Sumatera Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawahlunto menjadi kota terluas kedua, sedangkan Payakumbuh turun menjadi kota terluas ketiga.

Kota Payakumbuh adalah sebuah pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian, diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970, yang menetapkan kota ini menjadi daerah otonom dengan status pemerintahan daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Payakumbuh. Hal ini dikonfirmasi kembali melalui Radiogram Mendagri nomor SDP.9/6/181 yang menyatakan bahwa hari peresmian kota Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970, dan setiap tahun dilaksanakan sebagai Hari Jadi Kota Payakumbuh. Wilayah pemerintahan kota ini terbagi menjadi 3 kecamatan, dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong di 7 kanagarian. Pembagian kecamatan terdiri atas Payakumbuh Barat yang memiliki 31 kelurahan, Payakumbuh Timur yang memiliki 14 kelurahan, dan Payakumbuh Utara yang memiliki 28 kelurahan.

Sebelum tahun 1970, Payakumbuh merupakan bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga menjadi ibu kota kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, atas dasar perkembangan, dilakukan pemekaran wilayah kecamatan sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan, 8 kanagarian, dan 76 kelurahan. Pada tahun 2014 dan 2016 terjadi penggabungan beberapa kelurahan yang wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit, sehingga jumlah kelurahan berkurang menjadi 47 kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, wilayah administrasi Kota Payakumbuh terdiri atas lima kecamatan dengan total 47 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah

kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 17 kelurahan, yaitu Bulakan Balai Kandih, Ibuh, Koto Tangah, Kubu Gadang, Labuh Basilang, Nunang Daya Bangun, Padang Datar Tanah Mati, Padang Tinggi Piliang, Padang Tongah Balai Nan Duo, Pakan Sinayan, Parak Batung, Parik Rantang, Payolansek, Subarang Batung, Talang, Tanjung Godang, Sungai Pinago, dan Tanjung Pauh. Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki 9 kelurahan yang terdiri dari Balai Jaring, Koto Baru, Koto Panjang, Padang Alai Bodi, Padang Tangah Payobadar, Padang Tiakar, Payobasung, Sicincin, dan Tiakar. Jumlah yang sama juga terdapat di Kecamatan Payakumbuh Utara yang memiliki 9 kelurahan, yaitu Balai Tongah Koto, Ikua Koto Dibalai, Kotokociak Kubu Tapakrajo, Napar, Ompang Tanah Sirah, Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Diateh, dan Tigo Koto Dibuah.

Selanjutnya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Koto Panjang Dalam, Koto Panjang Padang, Padang Sikabu, Parambahan, Parik Muko Aie, dan Sungai Durian. Sementara itu, Kecamatan Payakumbuh Selatan juga memiliki 6 kelurahan, yakni Balai Panjang, Kapalo Koto Ampangan, Kototuo Limo Kampuang, Limbukan, Padang Karambia, dan Sawah Padang Aua Kuniang. Dengan total 47 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan, Kota Payakumbuh memiliki pembagian wilayah administratif yang cukup luas dan merata. Pembagian wilayah tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Payakumbuh (Pemerintah Kota Payakumbuh 2022, 7-11).

3.1.2 Kehidupan Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial merupakan bentuk kehidupan yang mengandung unsur kemasyarakatan, di mana terjadi hubungan dan interaksi antarindividu. Dalam kehidupan sosial, komunikasi antarmanusia berkembang sehingga menimbulkan rasa saling membutuhkan satu

sama lain. Sementara itu, budaya merupakan cara hidup yang tumbuh dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang kompleks, seperti sistem kepercayaan, politik, adat istiadat, bahasa, seni, hingga bangunan. Dengan demikian, budaya menjadi pola hidup yang menyeluruh, bersifat luas, abstrak, dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam kehidupan sosial.

Kota Payakumbuh memiliki beragam kebudayaan yang masih dikenal masyarakat hingga saat ini. Salah satu tradisi yang paling diminati adalah pacuan kuda yang rutin diselenggarakan setiap tahun di arena pacuan Kubu Gadang, yang kini menjadi bagian dari kompleks GOR M. Yamin. Selain itu, kota ini juga memiliki kesenian tradisional berupa randai, yaitu pertunjukan seni yang memadukan tari daerah, gerakan silat, serta iringan nyanyian. Kesenian randai biasanya dipentaskan dalam acara adat maupun pertunjukan seni. Salah satu kelompok randai yang cukup terkenal berasal dari daerah Padang Alai, yaitu Randai Cinduo Mato.

Gambar 3.2

Randai Cinduo Mato



Sumber: Website TataNegara.ID

Masyarakat Payakumbuh juga dikenal dengan alat musik tradisional Talempong yang memiliki kemiripan dengan gamelan di Pulau Jawa. Talempong biasanya dimainkan dalam berbagai kegiatan adat, pesta pernikahan, dan acara tradisional lainnya. Selain Talempong, terdapat pula alat musik Saluang, yaitu alat musik tiup tradisional yang serupa dengan seruling dan masih dapat dijumpai hingga sekarang.

Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan Kota Batiah, Payakumbuh memiliki sejarah panjang dalam perjuangan masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan bangsa. Perjuangan masyarakat Payakumbuh tercatat memberikan pengorbanan besar demi terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih baik. Saat ini, nilai-nilai budaya Minangkabau yang mulai mengalami kemunduran kembali diupayakan untuk dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda serta para pemimpin daerah. Secara sosial budaya, daerah Payakumbuh termasuk wilayah pedalaman Minangkabau yang sejak dahulu dikenal memiliki budaya yang kuat dan tetap terjaga. Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan jati diri masyarakat Minangkabau sebagaimana mestinya (Navis, 1984).

3.2 Pendidikan Masyarakat Kota Payakumbuh

Secara keseluruhan, jumlah murid dan mahasiswa dari TK hingga perguruan tinggi di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 mencapai lebih dari 48.507 orang, dengan 206 lembaga pendidikan dan 3.141 tenaga pendidik. Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) menempati posisi terbesar dalam struktur pendidikan Kota Payakumbuh. Tercatat terdapat 87 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dengan jumlah peserta didik mencapai 16.943 murid dan 1.086 guru. Sementara jumlah peserta didik di Kota Payakumbuh menunjukkan komposisi yang menarik, di mana jenjang SMA/SMK/ MA tercatat memiliki murid lebih banyak dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs. Berdasarkan data, terdapat 15.064 murid di tingkat SMA

sederajat, sedangkan jumlah murid SMP sederajat hanya 10.706 orang. Artinya, terdapat selisih lebih dari 4.300 murid.

Tabel 3.1
Persentase Pendidikan Masyarakat Kota Payakumbuh

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan
Tidak mempunyai ijazah	4,95	6,15
SD Sederajat	17,89	12,90
SMP Sederajat	20,77	18,72
SMA/SMK Sederajat	41,15	41,28
Pendidikan Tinggi	15,24	20,94
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan tabel, baik laki maupun perempuan di Kota Payakumbuh didominasi oleh penduduk yang memiliki ijazah SMA/SMK Sederajat. Pada kelompok laki-laki yang memiliki ijazah SMA/SMK yaitu 41,15 persen, kemudian diikuti oleh SMP sederajat 20,77 persen, lanjut diikuti oleh SD Sederajat 17,89 persen, pendidikan tinggi sebesar 15,24 persen, dan terakhir tidak mempunyai ijazah 4,95 persen.

Sementara itu pada kelompok perempuan juga didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 41,28 persen, kemudian pendidikan tinggi 20,94 persen, SMP sebesar 18,72 persen, SD sebesar 12,90 persen, dan terakhir tidak mempunyai ijazah sebesar 6,15 persen.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Payakumbuh cukup baik karena sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah, baik SMA maupun SMK. Selain itu, jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi mencapai 20,94 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 15,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Payakumbuh memiliki partisipasi yang tinggi dalam pendidikan. Namun, masih banyak terdapat penduduk

yang tidak memiliki ijazah, baik laki-laki maupun perempuan yang menunjukkan adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan.

3.3 Pekerjaan Masyarakat Kota Payakumbuh

Sebagian besar penduduk Kota Payakumbuh baik laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yakni sebesar 45,82 persen. Selanjutnya berusaha sendiri sebesar 18,89 persen. Sedangkan paling sedikit bekerja sebagai pekerja bebas non-pertanian sebesar 3,70 persen.

Tabel 3.2

Pekerjaan Utama Masyarakat Kota Payakumbuh

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	19,01	18,73	18,89
Berusaha diibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	12,35	7,45	10,26
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10,19	4,84	7,91
Buruh/karyawan/pegawai	45,10	46,77	45,82
Pekerja bebas non pertanian	5,61	1,12	3,70
Pekerja bebas	8,27	3,51	6,24
Pekerja keluarga/ tidak dibayar	5,07	18,69	10,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Angkatan Kerja 2025

Selain yang memiliki pekerjaan, di Kota Payakumbuh juga terdapat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan dan orang yang sedang tidak mencari pekerjaan atau

mempersiapkan usaha karena merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan dan orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulainya. Pada tahun 2024 dari total 77.907 angkatan kerja terdapat 3.812 orang pengangguran dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,84 persen. Artinya, setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat 4-5 orang yang menganggur.

Tabel 3.3
Kategori Pengangguran Di Kota Payakumbuh

Kategori Pengangguran	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Mencari pekerjaan	1.667	1.469	3.136
Mempersiapkan usaha	34	NA	34
Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	153	369	522
Sudah dapat pekerjaan tapi belum mulai bekerja	99	NA	99
Total	1.953	1.838	3.791

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Sakernas Agustus 2025

Berdasarkan tabel, pada tahun 2025, terdapat sebanyak 3.791 pengangguran. Menurut jenis kelamin, jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu sebanyak 1.953 orang dan 1.838 orang.

3.4 Realitas Sosial Pengemis di Kota Payakumbuh

Tabel 3.4

Data PPKS

NO	JENIS PPKS	NAMA	STATUS DTKS/DTSEN	BANSOS	DESIL
1	Pengemis	YUNAIIDI	Terdaftar	PERMAKINAN APBD	2
2	Pengemis	NURMAN	Terdaftar	PBI	4
3	Pengemis	TUTUT SUNARSEH	Terdaftar	PERMAKINAN APBD	3
4	Pengemis	ERMAILIS	Terdaftar	-	4
5	Pengemis	PUTRI AYU	Terdaftar	-	0
6	Pengemis	NOVITA HARYANTO	Terdaftar	PKH, SEMBAKO	3
7	Pengemis	DONA KARMILA	Terdaftar	PKH, SEMBAKO	1
8	Pengemis	SYAMSIAR	Terdaftar	PBI	2
9	Pengemis	ELNOFITA	Terdaftar	-	4
10	Pengemis	NUJATI	Terdaftar	-	3
11	Pengemis	ERNI SUSANTI	Terdaftar	PBI	1
12	Pengemis	OCIN	Terdaftar	-	3
13	Pengemis	ROSNANI	Terdaftar	PBI	2
14	Pengemis	Sarial Ujang	Terdaftar	PBI	4

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Berdasarkan data verifikasi dan validasi PPKS pada tahun 2025, kehidupan pengemis di Kota Payakumbuh memberikan gambaran yang cukup rumit, meskipun jumlah mereka mengalami penurunan yaitu, sekitar 14 orang. Angka tersebut memang tidak terlalu besar dibandingkan kota-kota besar lainnya, tetapi keberadaan mereka tetap mencerminkan isu sosial yang nyata serta berkelanjutan. Kejadian ini bukanlah suatu kejadian yang kebetulan, melainkan menunjukkan adanya kelompok masyarakat tertentu yang secara terus-menerus berada dalam situasi rentan dan belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan sosial dan ekonomi.

Dari perspektif kesejahteraan, mayoritas pengemis yang tercatat termasuk kedalam kategori desil yang rendah yang mencerminkan keadaan kemiskinan yang sangat parah. Ini menunjukkan bahwa mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang sangat terbatas dan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan meminta-minta tidak hanya merupakan pilihan pribadi, namun lebih merupakan akibat dari kemiskinan struktural yang menghalangi mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan dan peluang ekonomi lainnya.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa beberapa pengemis telah mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan serta bantuan makanan yang berasal dari APBD. Namun, masih ada individu yang belum menerima bantuan atau tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial, sekaligus mengindikasikan bahwa kehadiran bantuan tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mendasar. Dalam praktiknya, walaupun telah memperoleh bantuan, sejumlah pengemis tetap melakukan aktivitas mengemis karena bantuan yang diterima masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara keseluruhan atau tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Lebih dalam, aksi mengemis dalam konteks ini dapat dipahami sebagai metode bertahan hidup yang dilakukan oleh individu yang menghadapi tekanan ekonomi. Terbatasnya keterampilan, usia yang tidak lagi produktif, rendahnya pendidikan, serta kurangnya akses kepada lapangan pekerjaan merupakan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk tetap terjebak dalam situasi ini. Dengan kata lain, tindakan mengemis bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga sangat terkait dengan dimensi sosial yang lebih luas, termasuk marginalisasi dan keterbatasan akses terhadap sistem perlindungan sosial yang menyeluruh.

Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah telah berusaha melakukan pendataan dan memberikan bantuan sosial, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pengemis belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Program yang tersedia cenderung masih mengutamakan pendekatan karitatif berupa bantuan langsung, sedangkan aspek rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi belum berjalan dengan maksimal. Akibatnya, pengemis tetap terjebak dalam ketergantungan dan belum dapat keluar dari keadaan yang membatasi mereka.